

WAWASAN

Halaman 2

Edisi Sabtu 14 September 2013

TRANSAKSI PROYEK PEMPROV JATENG HARUS LEWT BANK

SEMARANG - Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara dan mencegah terjadinya korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) *road show* mendatangi kantor-kantor pemerintah provinsi. *Road show* ini, dipimpin langsung Ketua BPK RI Hadi Poernomo, bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

BPK menghimbau pimpinan Pemprov Jateng, untuk melakukan Non Cash Transactions (NCT) atau lewat bank dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Cara itu dilakukan BPK, mengingat seringkali terjadi penyimpangan di bidang pengadaan barang dan jasa dengan cara transaksi tunai.

"Kasus yang terjadi pada

Bank Century dan Hambalang adalah salah satu contoh permasalahan karena transaksi-transaksi yang dilakukan secara tunai. Karena itu BPK menghimbau supaya transaksi-transaksi yang dilakukan pemenang tender dilakukan dengan cara nontunai melalui sistem perbankan," kata Hadi pada konferensi di Lantai 2 Gedung Setda Pemprov Jateng, Jumat (13/9).

Menurutnya, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilakukan, baik melalui perbaikan ketentuan perundang-undangan, maupun sistem *e-procurement*. Sistem tersebut, katanya, mengatur proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik sehingga dapat meningkatkan trans-

paransi dan akuntabilitas.

"Tadi setelah bertemu dengan Ganjar, ternyata setelah kami imbau bersedia untuk melaksanakan ini. Bahkan sebelum kami selesai bicara, Ganjar sudah mengatakan bersedia. Kami ya sangat senang. Semoga kedepan dengan adanya transaksi non tunai ini, upaya praktik korupsi tidak lagi terjadi," katanya.

Menurut Hadi, paling tepat sekarang ini bukan tindakan represif tapi preventif. Aritnya, kata dia, untuk memberantas korupsi sekarang, bukan dengan cara meinindak setelah kejadian. Lebih tepat lagi, katanya, bertindak preventif mencegah atau menutup celah-celah korupsi dengan sistem pembayaran nontunai.

"Toh kita ini ingin member-

antas, bukan menghancurkan. Lebih baik melakukan langkah preventif antisipatif bukan reaktifnya. Ibaratnya, sebelum penyakit datang mari kita jalan kaki di Bundaran Simpang Lima," katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyambut baik adanya rencana transaksi non tunai mengatakan, sekarang harus memberikan teladan kepada pemerintah daerah. Menurut dia, ketika Provinsi Jateng bisa melakukan contoh baik itu maka akan menjadi contoh lainnya.

"Kami akan melanjutkan amanah dari BPK ini dengan mengajak rebugan dan pelan-pelan ngomong dengan beberapa bupati di Jateng mau atau tidak. Memang tidak ada jaminan dengan menggunakan transaksi non

tunai itu tidak ada korupsi. Tapi kami akan mencoba berkominikas dengan beberapa kepala daerah," katanya. ■ *M10-yan*



BERI KETERANGAN: Ketua BPK RI Hadi Poernomo (kanan) menerangkan adanya rencana Non Cash Transactions (NCT) atau transaksi tunai untuk proyek Pemprov Jateng, dalam pengadaan barang dan jasa, Jumat (13/9). ■ Foto: *Ceprudin-yan*